



Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai

Assistance in Drafting Village Regulations to Support Governance in Tanjung Mulia Village, Hinai District

Muhammad Yusrizal¹, Ramlan², Tengku Erwinsyahbana³, Siti Hajar^{4*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Corresponding Author: E-mail: sitihajar@umsu.ac.id

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 19 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Peraturan Desa;

Good Governance;

Pemerintahan Desa

Keywords:

Village Regulations;

Good Governance;

Village Government;

DOI: [10.56338/jks.v8i1.7029](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7029)

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan penyusunan peraturan Desa bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam merancang dan mengimplementasikan aturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini sangat penting dalam mendukung tata pemerintahan yang baik di tingkat desa, karena peraturan desa berfungsi untuk menjadi landasan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan survey, kemudian dilakukan sosialisasi dan penyuluhan dan selanjutnya dilakukan pendampingan dalam menyusun dan merevisi draf peraturan desa yang telah tersusun. Hasil dari pendampingan ini juga dapat memastikan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah, provinsi dan nasional sehingga mewujudkan keselarasan dengan hukum dan menghindari konflik hukum di kemudian hari. Proses dalam pendampingan ini melibatkan pembuatan dokumen perencanaan, pengkajian secara politik dan administrasi serta uji publik sehingga dapat memastikan bahwa peraturan memiliki landasan yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Peraturan desa yang tersusun dengan jelas dan tepat sasaran maka dapat mendukung tata kelola pemerintahan di desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan di desa.

ABSTRACT

The Village Regulation Drafting Assistance Activity aims to assist the village government in designing and implementing regulations that are in accordance with local needs. This process is very important in supporting good governance at the village level, because village regulations serve as a legal basis for regulating various aspects of community life. The implementation method in this activity is to first conduct a survey, then conduct socialization and counseling and then provide assistance in drafting and revising the draft village regulations that have been prepared. The results of this assistance can also ensure that village regulations do not conflict with higher regulations, such as regional, provincial and regulations, so as to realize harmony with the law and avoid legal conflicts in the future. The process in this assistance involves the preparation of planning documents, political and administrative studies and public testing so that it can ensure that the regulations have a strong foundation and can be accepted by all stakeholders. Village regulations that are clearly and precisely formulated can support village governance to be more transparent, accountable, and responsive to community needs and can also support sustainable development in the village.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan yang berbasis masyarakat lokal. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerapkan peraturan desa yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, banyak desa menghadapi kendala dalam proses penyusunan peraturan desa, baik karena kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan sumber daya, maupun kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa, diperlukan pendampingan yang komprehensif dalam proses penyusunan peraturan desa. Penyusunan peraturan desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga alat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Penyusunan peraturan desa memainkan peran penting dalam mendukung prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan desa. *Good governance* mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah bagaimana penyusunan peraturan desa dapat mendukung *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, kepatuhan terhadap hukum, monitoring dan evaluasi. Penyusunan peraturan desa yang berbasis *good governance* menjadi fondasi untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, penyusunan peraturan desa dapat 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa; 2) Memastikan penggunaan sumber daya desa secara transparan dan bertanggung jawab; 3) Mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan; 4) Mengurangi konflik internal karena adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama.

Pemerintahan desa adalah kerangka kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa, baik eksekutif (pemerintah desa) maupun legislative (BPD) dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi sebuah dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena harus adanya kesiapan pemerintahan desa terkait semua aspek yang dapat mendukung penataan desa sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa ini adalah keterlibatan masyarakat yang masih rendah dan kemampuan sumber daya manusia di pemerintah desa juga belum memadai sehingga sangat perlu adanya pendampingan dalam penyusunan peraturan desa sehingga dapat mewujudkan kemandirian desa yang lebih kuat baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasil identifikasi yang dilakukan pada mitra, juga ditemukan beberapa permasalahan terkait penyusunan peraturan desa di Desa Tanjung Mulia, yaitu 1) Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan yang diperoleh oleh pemerintahan desa yang berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan peraturan desa yang baik dan benar dan sesuai dengan landasan hukum di atasnya; 2) Minimnya tingkat kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam mendukung pemerintahan desa dalam perencanaan desa untuk mendukung pembangunan desa.

Permasalahan ini juga terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang menjaga lingkungan, ketidakdisiplinan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mengakibatkan terganggunya sistem tata pemerintahan desa. Masalah yang dihadapi oleh Desa Tanjung Mulia ini juga sesuai dengan yang hasil penelitian yang dilakukan oleh Yarni, et al (2021) bahwa pentingnya peraturan desa untuk dapat mewujudkan desa yang mandiri dan desa yang tertib untuk mencapai peningkatan dalam penataan desa. Begitu juga dengan hasil penelitian Hajar (2017), yaitu 1) Bahwa pemerintahan desa membutuhkan peningkatan sumber daya manusia (perangkat desa) untuk mengelola administrasi desa, 2) Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur desa sebagai faktor utama dalam penguatan pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 3) Dengan adanya

pengelolaan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa makan dapat menghasilkan kinerja yang baik, 4) Dibutuhkan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga tata pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pembuatan peraturan desa di Desa Tanjung Mulia. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan segenap perangkat pemerintahan desa dalam pembuatan peraturan desa sebagai upaya mendukung kemajuan dan pembangunan desa. dalam memahami pentingnya peraturan desa dalam efektivitas tata pemerintahan juga dalam mewujudkan visi misi dari Desa Tanjung Mulia.

Program kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada aparatur Desa Tanjung Mulia dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Pendampingan ini mencakup identifikasi masalah, pemberian penyuluhan hukum, hingga fasilitasi proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat terbentuk peraturan desa yang mendukung tata pemerintahan yang lebih efektif, sehingga mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan kapasitas desa dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta upaya untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai penggerak utama dalam pembangunan lokal.

METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tanjung Mulia ini, melibatkan stakeholder desa, mencakup kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya pemahaman perangkat desa di pemerintahan desa menjadi sumber masalah yang menyebabkan kurangnya peraturan desa yang terbentuk, maka tim pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan serta bimbingan dalam hal mekanisme penyusunan peraturan desa yang baik. Maka, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif. Yuwono (2018) bahwa pendampingan penyusunan peraturan desa juga dapat dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kerjasama antara akademisi, pemerintah dan masyarakat. Dimana akademisi memberikan dukungan teknis dan ilmiah, pemerintah memberikan kerangka regulasi dan masyarakat memberikan masukan kontekstual. Kemudian, pelaksanaan pendekatan ini juga dijelaskan oleh Akhmaddhian (2020) terdapat tiga tahapan dalam pendekatan ini, yaitu 1) dilakukan survey terkait masalah yang dihadapi oleh pemerintahan desa sehingga tergambar dengan jelas masalah dalam penyusunan peraturan desa; 2) dilakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait peraturan desa dan tata pemerintahan desa; 3) selanjutnya pendampingan dan bimbingan untuk perumusan kebijakan yang kemudian tersusunnya peraturan desa. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengoptimalkan hasil dari penyusunan peraturan desa sesuai dengan tataran teori dan praktiknya sehingga dapat terukur jelas dalam mewujudkan target indeks desa membangun dan pemerintahan desa mampu memahami mekanisme pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan norma, nilai dan kebutuhan masyarakat. Adapun tahapan dalam metode kegiatan PKM ini dituangkan dalam gambar



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan Desa



Gambar 2
Lokasi Mitra PKM

HASIL

Desa Tanjung Mulia merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Langkat khususnya di Kecamatan Hinai, yang memiliki luas wilayah $\pm 166,25$ Ha dengan jumlah penduduk 4600 jiwa dengan 1396 KK. Wilayah desa ini berbatasan dengan Batu Malenggang di sebelah utara, kemudian di sebelah Selatan dengan Desa Suka Damai, sebelah timur dengan Desa Muka Paya dan Sebelah Barat dengan Perkebunan Tanjung Beringin. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Tanjung Mulia adalah petani dan buruh Perkebunan, dan penghasilan desa juga bersumber dari sektor pertanian dan Perkebunan. Pencapaian keberhasilan pembangunan desa di Tanjung Mulia juga tidak terlepas dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disinyalir dapat membawa perubahan dalam perkembangan desa, untuk menuju tercapainya indeks desa membangun (IDM). Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Adapun yang menjadi kategori dalam Indeks Desa Membangun adalah 1) desa sangat tertinggal; 2) desa tertinggal; 3) desa berkembang; 4) desa maju, dan; 5) desa mandiri. Maka, untuk mewujudkan indeks desa membangun dalam pembangunan desa melalui tata pemerintahan yang baik di desa, penting adanya landasan hukum yang kuat untuk mendukung program pembangunan desa sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik di Desa Tanjung Mulia. Hajar (2021) dan Hanafie, et al (2022) menjelaskan bahwa yang dikatakan pemerintahan desa merujuk pada keseluruhan proses dan struktur yang melibatkan pengelolaan urusan publik di desa yang mencakup pemerintah desa (sebagai lembaga eksekutif) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif atau perwakilan masyarakat dalam menyusun peraturan desa. Kemudian, Rochim., et al (2021) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan desa mencakup semua aspek pengelolaan desa, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik. Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Darusman, et al (2021) pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat. Maka, dalam tata kelola pemerintahan desa, peraturan desa menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Dengan demikian, pemerintah desa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa

semua kebijakan dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Namun, tidak semua desa yang mengimplementasikan undang-undang desa ini dapat mewujudkan status tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Desa Mandiri, upaya untuk mewujudkan ini banyak tahapan yang harus dilaksanakan dan didukung oleh sumber daya yang kuat termasuk dokumen peraturan desa selain sumber daya manusianya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, juga memberikan kontribusi bagi mitra yaitu revisi peraturan desa tentang keamanan dan ketertiban desa yang telah disusun oleh pemerintahan desa dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sesuai dengan alur kegiatan dalam PKM terkait pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, sebagai berikut:

Survey (Identifikasi Masalah)

Tahap awal adalah melakukan survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Tanjung Mulia terkait tata pemerintahan desa. Langkah ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan desa.



Gambar 3
Tahapan Awal Kegiatan PKM

Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Peraturan Desa dan Tata Pemerintahan Desa

Setelah identifikasi masalah, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya peraturan desa dalam tata pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai regulasi desa, fungsi peraturan, dan proses pembuatannya.



Gambar 4
Tahapan Sosialisasi Kegiatan

Terbentuknya Peraturan Desa pada Desa Tanjung Mulia

Tahap akhir adalah hasil nyata dari proses tersebut, yaitu terbentuknya peraturan desa yang menjadi landasan hukum dalam tata pemerintahan di Desa Tanjung Mulia. Peraturan ini diharapkan mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) terkait pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, telah memberikan dampak positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi desa dalam tata pemerintahan, serta memberikan solusi berupa penyusunan peraturan desa yang relevan, inklusif, dan aplikatif.

Pendekatan yang digunakan mencakup berbagai tahapan strategis, mulai dari survei untuk mengidentifikasi masalah, penyuluhan tentang pentingnya peraturan desa, hingga pendampingan intensif dalam proses perumusan kebijakan. Kegiatan ini tidak hanya membantu aparatur desa memahami kerangka hukum dan prosedur penyusunan peraturan desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah desa, kegiatan ini mencerminkan prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hasil nyata dari program ini adalah terbentuknya peraturan desa yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Tanjung Mulia tetapi juga selaras dengan regulasi yang berlaku. Peraturan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, mengelola sumber daya secara lebih optimal, dan memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga memberikan landasan kuat untuk penguatan tata pemerintahan desa yang lebih transparan dan responsif di masa depan. Sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola desa yang baik, kegiatan PKM ini juga menggarisbawahi pentingnya pendampingan berkelanjutan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan desa. Melalui monitoring dan evaluasi, dampak dari peraturan yang disusun dapat diukur, sehingga perbaikan atau penyesuaian dapat dilakukan untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara masyarakat, aparatur desa, dan pihak pendamping dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi desa. Pendampingan penyusunan peraturan desa bukan hanya tentang menciptakan dokumen hukum, tetapi juga memberdayakan desa untuk berperan aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi model yang dapat direplikasi di desa-desa lain untuk mendukung tata pemerintahan desa yang lebih baik sesuai dengan semangat *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. 2020. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Empowerment*, Volume 3 No. 1 (2020) Universitas Kuningan. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Darusman, M. Yoyon., et al. 2021. Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. *Jurnal ABDIMAS: Tridharma Manajemen* Vol, 2 No 2 Edisi April 2021, Hal 125 – 129
- Hajar, Siti. 2017. Increased Capacity Village Officials About Governance Administration in of The Village Administration. *Advances In Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 84: International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) by Atlantis Press.
- Hajar, Siti. 2021. *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan; UMSU Press
- Hanafie, Khaer, Nurharsya., et al. *Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya*

- Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa. *Inovasi: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022
- Rochim, Ibnu, Achluddin., Endang., Radjikan. 2021. Penyuluhan dan Pendampingan Bidang Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Nasional: Abdi Massa*, Volume 1 No 01 (2021) <https://aksiologi.org/index.php/abdimassa/article/view/1>
- Yarni, Meri., et al. 2021. Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi*, Volume 5 Nomor 3 Desember 2021
- Yuwono, S. 2018. *Kolaborasi dalam Pembuatan Kebijakan Desa*. Malang; Universitas Brawijaya Press.